

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashibly. *Hukum Jaminan* (Bengkulu : MIH Unihaz, 2018)
- Burhan Asshoha, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004)
- Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan* (Depok : Rajawali Pers, 2023)
- Hidayah K., Fidhayanti D, *Hukum Jaminan Kajian Konsep dan Kritik Pengaturan Jaminan di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2022)
- Paramita Prananingtyas, *Hukum Perusahaan*, (Semarang : Yoga Pratama, 2019)
- Patrik P. Kashadi, *Hukum Jaminan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005)
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta : Rajawalipers, 2014)
- Sigit Sapto Nugoro. dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta : Oase Pustaka, 2020)
- Zaeni Asyhadie, *HUKUM BISNIS : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2022)

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Agus Salim Harahap, “*Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitaan Perseroan Terbatas*”, Lex Jurnalica Vol. 5 No.3, Agustus 2008, hlm. 6.
- Ayu Kharismadiani, *Tindakan Direksi yang harus mendapat Persetujuan Komisari dan/atau RUPS*, APLAWOFFICE, 7 Maret 2022.
<https://www.aplawoffice.id/tindakan-direksi-yang-harus-mendapat-persetujuan-komisaris-dan-atau-rups/>
- Bernadetha Aurelia, O. “*5 jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan*”. Hukum Online, Januari 7, 2025
- Distingsi, (2025), Power Tends To Corrupt, Absolute Power Corrupts Absolutely: Pengertian, Makna, dan Bahaya, [Power Tends To Corrupt, Absolute Power Corrupts Absolutely: Pengertian, Makna, dan Bahaya - Distingsi.com: Menyajikan Fakta dalam Data](#)

- Catalina Moeliani, *Konsep Pertanggung Jawaban dan Tata Kelola Dalam Perseroan Perorangan*, Badamai Law Journal, Vol. 8, No. 2, September 2023, hlm. 476.
- Fera Puspito Rianto, “*Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jaminan Corporate Guarantee Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*”, Jurnal Aktualita, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 632
- Hidayat. Nurman, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 4, 2014, hlm. 1
- Indira Retno Aryatie, *Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan*, Hukum Online, 5 Juli 2021, [Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan! | Klinik Hukumonline](#)
- Irfani. Nurfaqih, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior : Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 3, hlm 306.
- Johan. Suwinto, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pribadi Pada Transaksi Pembiayaan Ritel oleh Lembaga Keuangan Berdasarkan Perundang-Undangan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 52, No. 1, Maret 2023, Hlm. 70.
- Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Mimbab Hukum, Vol.26, No. 1, Februari 2014, hlm 71.
- M. Rauhan Nugraha, *Perbedaan RUPS Luar Biasa dengan Keputusan Sirkuler*, Hukum Online, 14 Januari 2025. [Perbedaan RUPS Luar Biasa dengan Keputusan Sirkuler | Klinik Hukumonline](#)
- Niken P, Tony H. “*Jaminan Perlindungan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*”. Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8 No.1, Juni 2015
- Pahlefi, *Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, Oktober 2016, hlm. 129.
- Rumawi, dkk. “*Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia*”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12, No. 1 Maret 2023
- Siti Aisah, “*Personal Guarantee dan Corporate Guarantee dalam Putusan Peradilan Niaga*”, Jurnal Hukum No. 19 Vol. 9 Februari 2002, hlm 52

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas